Pontianak Post
Jumat 22 Juli 2011

Sekda Harus Serius Urus Aset Negara

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar dengan pengecualian atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2010. Anggota Komisi VI BPK, Rizal Djalil mengingatkan pemprov

• ke halaman 15 kolom 5

"Kalbar bisa mendapat opini jauh lebih baik dari WDP. Saya meminta perhatian Sekda untuk serius terhadap aset negara

Rizal Djalil

Sambungan dari halaman 9

untuk serius memperhatikan persoalan aset dengan membentuk tim.

"Sebenarnya Kalbar bisa mendapat opini jauh lebih baik dari WDP. Sedikit lagi bisa wajar tanpa pengecualian. Persoalannya, saya meminta perhatian Sekda untuk serius terhadap aset negara," ujar Rizal dalam Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2010, Kamis (21/7) pagi, di Balairungsari Gedung DPRD.

Menurut Rizal, pengelolaan aset merupakan tugas jajaran Sekda, sedangkan Gubernur bertugas mengambil keputusan strategis. Hal yang perlu diperhatikan adalah inventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak. Aset-aset tersebut perlu diperbaiki.

"Kami meminta pemprov membentuk tim, DPRD juga bisa membentuk panitia kerja terhadap persoalan aset," katanya.

Rizal menyatakan persoalan aset yang terjadi lebih pada organisasi internal. Misalnya, ada mobil berusia 20 tahun dan masih terdaftar, sedangkan mobilnya sudah tidak ada. Seharusnya, bisa dihapus dan dikoordinasikan dengan BPK. Selain itu ada beberapa hal yang irrasional berkaitan dengan aset. Pada zaman Presiden Soeharto berkuasa, ada program yang baik untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yakni pembangunan SD Inpres.

"Sekarang ditanya mana sertifikatnya. Itu irrasional karena pada zaman itu tidak sempat membuat sertifikat," ujar Rizal, kemudian menyatakan dirinya mendukung pihak swasta yang ingin berinvestasi, tetapi harus secara benar, akuntabel, dan tidak boleh menyulitkan birokrasi.

Hal lain yang disinggung Rizal adalah fungsi dewan sebagai mitra Gubernur dan pemerintah daerah. Selama ini dewan memiliki konstituen.

Ia mengusulkan kepada dewan dan gubernur untuk membuka ruang melalui program yang akuntabel. Program tersebut dapay mengakomodir kepentingan politik dan konstituen tetapi sesuai aturan yang ada.

"Studi banding boleh saja. Asal programnya jelas. Ajak wartawan biar transparan. Jangan seperti dewan di sana, pergi ngumpet-ngumpet, akhirnya jadi masalah," ungkapnya.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2010 menunjukkan Kalbar memperoleh surplus sebesar Rp100 miliar. Pada anggaran pendapatan daerah dianggarkan Rp1,6 triliun dan realisasinya Rp1,7 triliun.

Anggaran belanja pemprov sebesar Rp1,56 triliun, tetapi realisasinya Rp1,4 triliun. "Ini menunjukkan ada upaya penghematan dan kehati-hatian untuk tidak menghabiskan dana. Ini langkah yang akuntabel," timpal Rizal.

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan BPK sudah memberikan instruksi secara jelas dan pemprov tinggal melaksanakannya saja. "Secara teknis sudah diarahkan. Tinggal mau kerja tidak.

Jelas ada instruksinya siapa yang bertanggung jawab mengurusnya. Jika tidak mampu buat tim, bicara dengan dewan. Gubernur tidak mungkin mengurus sertifikat," ungkapnya.

Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie enggan berkomentar terkait persoalan aset tersebut. Ia berlalu begitu saja seusai paripurna, tanpa menoleh sedikit pun. ***(uni)***